

CALK AUDITED TAHUN 2018

(CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN)



RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO



Jl. Dr. Gumbreg 1 Purwokerto



(0281) 632708 , fax. (0281) 631015



rsmargono@jatengprov.go.id



facebook.com/RSMargono



twitter.com/rsudmargono



instagram.com/rsudmargono



youtube.com/user/rsmargono

rsmargono.jatengprov.go.id

rsmargono.jatengprov.go.id/ppid

rsmargono.jatengprov.go.id/rsms-opendata

rsmargono.jatengprov.go.id/registrasi-online

rsmargono.jatengprov.go.id/wbs

Rsmargono.jatengprov.go.id/tele_apik



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi dan seluruh transaksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jawa Tengah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto selama satu periode pelaporan. Laporan terutama digunakan membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya peraturan perundang-undangan.

SKPD RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan SKPD RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh anggaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan perturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto terdiri dari:

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar serta kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca. Setiap pos aset dan kewajiban diungkapkan mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit

5. Pembiayaan

6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

d. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, juga mengatur bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah.
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Tengah.
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- r. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0019385 Tanggal 06 November 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- s. Perda No 8 Tanggal 24 Juli 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah TA 2018

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0019385 tanggal 6 November 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan RSUD Prof. dr. Margono Sockarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Ekuitas
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Catatan Penting Lainnya

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintah Daerah, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- Tingkat daya beli masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.
- Adanya persiapan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang kompetitif, baik dari tarif dan bentuk pelayanan.
- Adanya globalisasi di lingkungan jasa pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masuknya/ didirikannya Rumah Sakit Berstandar Internasional (International Hospital).
- Tingkat inflasi yang belum stabil/Fluktuatif yang menyebabkan kenaikan harga-harga bahan baku rumah sakit (antara lain : obat-obatan, alat kesehatan, bahan penunjang lainnya, dll)

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Jawa Tengah mengacu pada kebijakan keuangan nasional. Fokus kebijakan keuangan ditujukan pada keunggulan daerah masing-masing. Jawa Tengah masih termasuk dalam daerah yang menarik sebagai tujuan investasi, sehingga pertumbuhan investasi Jawa Tengah cukup tinggi. Relokasi pasar tujuan ekspor mendorong perbaikan kinerja ekspor.

Dengan kebijakan yang telah diuraikan diatas, maka sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan restoran serta jasa usaha lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan yang baik pendapatan dan belanja di RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto tahun anggaran 2018 agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran, dan manfaat serta disiplin anggaran maka diambil langkah-langkah kebijakan keuangan berupa:

- Pengembangan jenis/produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-potensi pendapatan rumah sakit.
- Peningkatan cost recovery dalam rangka menciptakan kemandirian secara finansial.
- Pengendalian belanja/biaya rumah sakit (*Cost Containment Strategy*) dengan memperbaiki etos kerja karyawan rumah sakit.
- Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis akrual.
- Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dengan teknologi komputer (*Computerized*).
- Penyesuaian tarif berdasarkan peraturan daerah dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat serta daya saing pengguna jasa pelayanan kesehatan.

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2018, realisasi pendapatan seluruhnya berjumlah Rp 378.199.410.543 atau 109,62% dari target Anggaran Pendapatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 345.000.000.000 Hal ini berarti melebihi target penerimaan sebesar Rp 33.199.410.543 atau 9,62%. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pengembalian belanja TA.2017 sebesar Rp0,00 dan pendapatan dari BLUD Rp 378.199.410.543.

Rincian realisasi pendapatan sebagai berikut :

Tabel Realisasi Pendapatan TA 2018 dan TA 2017

(Dalam Rupiah)					
No.	Uraian	Anggaran	REALISASI		
			2018	%	2017
1	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	0.00%	-
2	Pendapatan BLUD	345,000,000,000	378,199,410,543	109.62%	321,889,626,780
	1. Pendapatan Pelayanan	333,915,968,000	364,882,192,253	109.27%	309,110,616,298
	2. Pendapatan Diklat	2,084,032,000	1,895,359,000	90.95%	1,817,524,000
	3. Pendapatan Lainnya	9,000,000,000	11,421,859,290	126.91%	10,961,486,482
	Jumlah	345,000,000,000	378,199,410,543	109.62%	321,889,626,780

2. Realiasis Belanja RSUD Prof dr Margono Soekarjo

Realisasi belanja RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran berakhir seluruhnya berjumlah Rp 504.212.732.062 atau 88,52% dari target Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 569.575.751.000 yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 92.444.680.886 atau 97,09% dari target Anggaran Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar Rp 95.216.263.000 dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 411.768.051.176 atau 86,61% dari target Anggaran Belanja Langsung yaitu sebesar Rp 474.359.488.000.

Tabel Realisasi Belanja TA.2018 dan TA. 2017

(Dalam Rupiah)

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	REALISASI		
			2018	%	2017
Belanja Daerah					
1	Belanja Tidak Langsung	95,216,263,000	92,444,680,886	97.09%	90,317,159,679
2	Belanja Langsung	474,359,488,000	411,768,051,176	86.81%	395,225,808,724
	1. Belanja Pegawai	40,000,000,000	31,169,547,187	77.92%	27,741,453,670
	2. Belanja Barang dan Jasa	324,497,847,000	281,060,228,868	86.61%	259,599,051,625
	3. Belanja Modal	109,861,641,000	99,538,275,121	90.60%	107,885,303,429
	Jumlah	569,575,751,000	504,212,732,062	88.52%	485,542,968,403

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pencapaian Realisasi Kinerja keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dapat diketahui bahwa realisasi pencapaian sebesar 88,52%. Hal ini menunjukkan kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sudah baik semua program berjalan dengan baik. Adapun hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus segera dipenuhi guna pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Adapun ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Tahun Anggaran 2018 Keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah sebagai berikut :

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2018

Satuan Kerja Perangkat Daerah : RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Fungsi :
Sub Fungsi :
Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran s 96%)
				Fisik (%)	Kau (%)	
1	2	3	4	5	6=4/3x100	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.024.972.000,00	10.024.960.632,00	100	100,00%	
12	Penyediaan bahan logistik kantor	10.024.972.000,00	10.024.960.632,00	100	100,00%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.000.000,00	330.111.500,00	100	94,32%	Sisa tender
2	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	350.000.000,00	330.111.500,00	100	94,32%	
3	Program Pelayanan Kesehatan	29.800.000.000,00	28.068.041.950,00	100	94,19%	Sisa tender
10	Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	19.800.000.000,00	19.567.209.990,00	100	98,93%	
12	Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat dampak asap rokok	10.000.000.000,00	8.480.831.960,00	100	84,81%	
5	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.000.000,00	24.945.000,00	1000	99,78%	
1	Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan	25.000.000,00	24.945.000,00	100	99,78%	
6	Program Promosi dan Pemberdayaan	150.000.000,00	147.669.350,00	100	98,45%	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Iik Provinsi	150.000.000,00	147.669.350,00	100	98,45%	
7	Prog. Peningkatan Mutu Pelay. Kesehatan BLUD	434.009.516.000,00	373.172.322.744,00	100	85,98%	Efisiensi Anggaran Obat dan AHP
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	434.009.516.000,00	373.172.322.744,00	100	85,98%	

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi di RSUD Prof dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah dan Keputusan Direktur/Pemimpin BLUD Nomor :445/32470/XII / 2015 tentang Kebijakan Akuntansi BLUD adalah sebagai berikut :

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan keuangan. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. Jika diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akrual berarti bahwa transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya.

4.3. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
- b. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
 - 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - 4) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e. Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan RSUD Prof dr. Margono Soekarjo Purwokerto, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.
- f. Entitas pelaporan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.3.1. Pendapatan

4.3.1.1 Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.1.1 Pendapatan – LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

- b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan/disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4.3.2. **Beban**

4.3.2.1 **Beban Operasi**

a. **Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b. **Beban Barang dan Jasa**

1) **Beban Persediaan**

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.

2) **Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas**

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3) **Beban Bunga Utang**

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

4) **Beban Subsidi**

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau lokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual

produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

5) Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadi transaksi.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

7) Beban Penyusutan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang ditetapkan.

8) Beban Amortisasi

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.

9) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan metode yaitu:

a. Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b. Metode penghapusan Langsung

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Beban piutang tak tertagih diukur dengan :

a. Metode penyisihan piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b. Metode Penghapusan Langsung

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

4.3.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa. Beban Transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

4.3.3. Aset

a. Pengertian Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang.

b. Klasifikasi Aset

1. Aset Lancar

a. Pengertian

Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.

b. Klasifikasi Aset Lancar

(1) Kas dan Setara kas

a) Pengertian

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari Aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

b) Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD.

c) Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

d) Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.

b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.

(2)Piutang

a) Pengertian

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional.

b) Pengakuan

Piutang diakui pada pada saat hak untuk menagih sehubungan adanya jasa/ tindakan pelayanan yang telah dilakukan terhadap pasien.

c) Pengukuran

a. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

b. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Atas dasar daftar umur piutang dibuat cadangan piutang tidak tertagih dengan kebijakan sebagai berikut :

Tabel Perhitungan Umur Piutang :

No	Status	Lama Menunggak	% Cad. Tidak Tertagih
1.	Lancar	< 1 Tahun	0,05%
2.	Kurang Lancar	1 sampai dengan 2 Tahun	10%
3.	Tidak Lancar	Diatas 2 sampai 5 Tahun	50%
4.	Macet	Diatas 5 Tahun	100%

c. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku (dimana piutang yang lebih dari 5 (lima) tahun diajukan ke Gubernur untuk persetujuan penghapusan piutang).

d) Penyajian dan Pengungkapan

a. Piutang usaha yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.

b. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

c. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- rincian jenis dan jumlah piutang;
- jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang;
- kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang;

- v. jumlah piutang yang dijadikan agunan;
- vi. jumlah piutang yang dijual (anjak piutang).

(3) Persediaan

a) Pengertian

Persediaan adalah Aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*).

b) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa, atau rusak.

c) Pengukuran

Persediaan diukur berdasarkan sebesar harga perolehannya, dan untuk penyimpanannya dengan menggunakan metode MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), dan penjualannya berdasarkan harga terakhir (harga pasar). Persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLUD dinilai sebesar harga perolehannya.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- b. Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*).
- c. Setiap akhir bulan dilakukan pemeriksaan fisik persediaan di masing-masing unit dan dibuat laporannya.
- d. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*), dengan dilampiri Berita Acara hasil stock opname per 31 Desember pada tahun berjalan.
- e. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain:
 - i. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - ii. jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca;
 - iii. jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode;
 - iv. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan;
 - v. nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

(4) Uang Muka

a) Pengertian

Menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/ pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggung-jawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang muka pembelian barang/ jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/ rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

b) Pengakuan

Uang muka diakui pada saat pembayaran, uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

c) Pengukuran

Uang muka diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan.

d) Penyajian dan Pengungkapan

a. Uang muka disajikan pada kelompok aset lancar di neraca.

b. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah uang muka serta batas waktu pertanggungjawaban.

(5) Biaya di Bayar di Muka

a) Pengertian

Pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka.

b) Pengakuan

Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran, diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima, dan berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu

c) Pengukuran

Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang diterima.

d) Penyajian dan Pengungkapan

a. Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.

b. Biaya dibayar di muka disajikan secara netto.

2. Aset Tidak Lancar

a. Pengertian

Aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dan tidak memenuhi kriteria Aset lancar.

b. Klasifikasi Aset Tidak Lancar

(1) Investasi Jangka Panjang

a) Pengertian

Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non-permanen lainnya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b) Pengakuan

Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLUD untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

c) Pengukuran

Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dalam hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual dan Investasi Non Permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

d) Penyajian dan Pengungkapan

a) Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset tidak lancar pada neraca.

b) Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan adalah untuk hal-hal sebagai berikut :

- i. rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
- ii. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi;
- iii. pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan;

3. Aset Tetap

a. Pengertian

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu tahun.

b. Pengakuan

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dengan nilai minimal Rp500.000,-
- Biaya perolehan Aset tetap dapat diukur secara andal.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Tidak Dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas atau diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

c. Pengukuran

- Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan dan apabila penilaian Aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar oleh tim (apabila belum ada nilai dari Aset itu) pada saat perolehan.
- Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehan terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa).
- Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset tersebut.
- Nilai aset tetap pada neraca adalah nilai yang telah direkonsiliasi di internal SKPD antara pengurus barang dengan PPK-SKPD dan telah direkonsiliasi dengan BPKAD bagian aset selaku Pembantu Pengelola Barang.

d. Metode Penyusutan

- Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.
- Umur manfaat adalah periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitasnya.
- Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan misalnya aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
- Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dikurangi Nilai Residu, Nilai Residu Rp.0,-.
- Daftar jenis, masa manfaat dan Penambahan Masa Manfaat seperti dalam lampiran dalam Bab Ini.

Keterangan :

1. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibangun atau dibeli dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap digunakan.
 2. Peralatan dan mesin yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai perolehan minimal atau sama dengan Rp. 500.000 dan dalam kondisi siap digunakan, mencakup :
 - a. Peralatan dan perlengkapan kantor seperti peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubeler, dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.
 - b. Peralatan dan perlengkapan rumah tangga seperti alat angkut, alat bengkel, alat dapur, Penghias ruang rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, dan peralatan dan perlengkapan RT lainnya.
 - c. Peralatan kedokteran meliputi peralatan kedokteran dan peralatan kedokteran lainnya.
 - d. Peralatan laboratorium meliputi peralatan laboratorium Klinik dan Anatomi
 3. Jalan, Jaringan dan Instalasi meliputi jaringan irigasi, Instalasi listrik, dan Instalasi telepon.
 4. Aset tetap mencakup Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan Aset tetap diatas meliputi koleksi buku / perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan budaya.
- e. Penyajian dan Pengungkapan
- (1) Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca.
 - (2) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap.
 - (3) Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
 - (4) Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha (*leasing*) disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok tersendiri.
 - (5) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:
 - i. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan;
 - ii. metode penyusutan yang digunakan;
 - iii. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - iv. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
 - v. nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan:

- a) penambahan;
- b) pelepasan;
- c) revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah;
- d) penurunan nilai tercatat;
- e) penyusutan;
- f) setiap pengklasifikasian kembali.
- vi. eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijamin untuk utang;
- vii. kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap;
- viii. uraian rincian dari masing-masing aset tetap;
- ix. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

4. Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain.
- 2) Ruang lingkup yang diatur pada bagian ini tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aktif aset tetap pemerintah.
- 3) Metode penyusutan Aset lainnya dengan amortisasi untuk aset tak berwujud dan akumulasi penyusutan untuk barang rusak berat. Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.
- 4) Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

4.3.4. Kewajiban

1. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

2. Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran kewajiban PPK yang telah diakui dalam periode berjalan.
3. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
5. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

4.3.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis ekuitas. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

1. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.

Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.

Pengukuran Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas:
 - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

3. Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah:
 - 1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - 2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - 3) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
 - 4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

- 5) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
 - 6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - 7) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - 8) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
 - 10) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
4. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
 5. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
 6. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos-pos Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran meliputi:

1. Penerimaan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Penerimaan yang sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan berada di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu.

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp378.199.410.543,34 atau 109,62% dari target Rp345.000.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp321.889.626.780 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	-	-	-	-
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang	345.000.000.000,00	378.199.410.543,34	109,62%	321.889.626.780,00
Jumlah	345.000.000.000,00	378.199.410.543,34	109,62%	321.889.626.780,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp378.199.410.543,34 atau 109,62% dari target Rp345.000.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp321.889.626.780 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	-	-	-	-
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang	345.000.000.000,00	378.199.410.543,34	109,62%	321.889.626.780,00
Jumlah	345.000.000.000,00	378.199.410.543,34	109,62%	321.889.626.780,00

5.1.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp378.199.410.543 atau 109,62% dari target Rp345.000.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp321.889.626.780 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Pendapatan BLUD - LRA	345.000.000.000,00	378.199.410.543,34	109,62%	321.889.626.780,00
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	-	-	-
Jumlah	345.000.000.000,00	378.199.410.543,34	109,62%	321.889.626.780,00

Total realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp378.199.410.543,34 dengan rincian pendapatan BLUD sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan dari Pengembalian				
Pendapatan BLUD :				
1. Pendapatan Pelayanan Kesehatan / Operasional	333.915.968.000,00	364.882.192.253,00	109,27%	309.110.616.298,00
2. Pendapatan Diklat	2.084.032.000,00	1.895.359.000,00	90,95%	1.817.524.000,00
3. Pendapatan Lainnya	9.000.000.000,00	11.421.859.290,34	126,91%	10.961.486.482,00
Jumlah	345.000.000.000,00	378.199.410.543,34	109,62%	321.889.626.780,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp404.674.456.941 atau 88,03% dari anggaran Rp459.714.110.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp377.657.664.974 dengan rincian sebagai

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	135.216.263.000,00	123.614.228.073,00	91,42%	118.058.613.349,00
Belanja Barang & Jasa	324.497.847.000,00	281.060.228.868,00	86,61%	259.599.051.625,00
Jumlah	459.714.110.000,00	404.674.456.941,00	88,03%	377.657.664.974,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp123.614.228.073 atau 91,42% dari anggaran Rp135.216.263.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp118.058.613.349 dengan rincian sebagai

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	95.216.263.000,00	92.444.680.886,00	97%	90.317.159.679,00
Belanja Pegawai langsung	40.000.000.000,00	31.169.547.187,00	78%	27.741.453.670,00
Jumlah	135.216.263.000,00	123.614.228.073,00	91,42%	118.058.613.349,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp281.060.228.868 atau 86,61% dari anggaran Rp342.497.847.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp259.599.051.625 dengan rincian sebagai

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis				
Belanja Bahan/Material	10.024.972.000,00	10.024.960.632,00	100%	19.998.886.614,00
Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-
Belanja Premi Asuransi	-	-	-	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bern	-	-	-	-
Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-
Belanja Sewa Rumah/ Gedung /Gudang/ Parkir	-	-	-	-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	-
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Makanan dan minuman	-	-	-	-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-	-
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertantu	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	25.000.000	24.945.000	100%	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
Belanja Jasa Konsultasi	-	-	-	-
Belanja Publikasi	150.000.000	147.669.350	98%	-
Belanja Barang & Jasa BLUD	314.297.875.000,00	270.862.653.886,00	86%	239.600.165.011,00
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/	-	-	-	-
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-	-	-
Jumlah	324.497.847.000,00	281.060.228.868,00	86,61%	259.599.051.625,00

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp99.538.275.121 atau 90,60 dari anggaran Rp109.861.641.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp107.885.303.429 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	61.141.641.000,00	55.917.922.701,00	91,46%	105.997.975.429,00
Belanja Gedung dan Bangunan	48.200.000.000,00	43.234.579.000,00	89,70%	-
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	500.000.000,00	368.292.000,00	73,66%	1.619.262.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	17.481.420,00	87,41%	268.066.000,00
Jumlah	109.861.641.000,00	99.538.275.121,00	90,60%	107.885.303.429,00

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran Rp0 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.2.1.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.398.153.450 atau 94,19% dari anggaran Rp30.150.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp46.119.873.953 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Angkut	350.000.000,00	330.111.500,00	94,32%	-
Belanja Alat-alat Bengkel	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	-	-	-	-

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Studio	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kedokteran	29.800.000.000,00	28.068.041.950,00	94,19%	46.119.873.953,00
Belanja Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Jumlah	30.150.000.000,00	28.398.153.450,00	94,19%	46.119.873.953,00

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp0 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	-	-	-	-
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	-	-	0,00%	-

5.1.2.1.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0 atau 0% dari anggaran Rp0 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
Belanja Instalansi	-	-	-	-
Belanja Jaringan	-	-	-	0
Jumlah	-	-	0,00%	-

5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0 atau 0% dari anggaran Rp0 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	-	-	-	-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanam	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-
Jumlah	-	-	0,00%	-

5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp71.140.121.671 atau 89,25% dari anggaran Rp79.711.641.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp61.765.429.476 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	30.991.641.000,00	27.519.769.251,00	88,80%	59.878.101.476,00
Belanja Gedung dan Bangunan	48.200.000.000,00	43.234.579.000,00	89,70%	-
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	500.000.000,00	368.292.000,00	73,66%	1.619.262.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	17.481.420,00	87,41%	268.066.000,00
Jumlah	79.711.641.000,00	71.140.121.671,00	89,25%	61.765.429.476,00

5.1.2.1.3.6.1. Belanja Modal BLUD Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran Rp0 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.2.1.3.6.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp27.519.769.251 atau 88,80% dari anggaran Rp30.991.641.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp59.878.101.476 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	5.172.000.000,00	4.717.440.000,00	91,21%	192.421.650,00
Belanja Alat-alat Angkut	17.819.850,00	17.819.850,00	100,00%	-
Belanja Alat-alat Bengkel dan Ukur	6.817.800,00	6.817.800,00	100,00%	66.560.000,00
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	0,00%	-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	1.886.112.350,00	1.574.140.756,00	83,46%	7.982.861.717,00
Belanja Alat-alat Studio Komunikasi	-	-	0,00%	625.000.000,00
Belanja Alat-alat Kedokteran	20.823.919.600,00	18.219.735.512,00	87,49%	51.011.258.109,00
Belanja Alat-alat Laboratorium	33.971.400,00	33.971.400,00	100,00%	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	0,00%	-
Belanja Alat-alat Komputer	3.051.000.000,00	2.949.843.933,00	96,68%	-
Jumlah	30.991.641.000,00	27.519.769.251,00	88,80%	59.878.101.476,00

5.1.2.1.3.6.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp43.234.579.000,00 atau 90,00% dari anggaran Rp48.200.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	48.200.000.000,00	43.234.579.000,00	90%	-
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	48.200.000.000,00	43.234.579.000,00	90%	-

5.1.2.1.3.6.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp368.292.000 atau 73,66% dari anggaran Rp500.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.619.262.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	Realisasi 2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
Belanja Instalansi	-	-	-	-
Belanja Jaringan	500.000.000,00	368.292.000,00	73,66%	1.619.262.000,00
Jumlah	500.000.000,00	368.292.000,00	73,66%	1.619.262.000,00

5.1.2.1.3.6.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.481.420 atau 87,41% dari anggaran Rp20.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp268.066.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2018		%	2017
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	20.000.000,00	17.481.420,00	87,41%	268.066.000,00
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	-	-	-	-
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-
Jumlah	20.000.000,00	17.481.420,00	87,41%	268.066.000,00

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp(126.013.321.518,66), sedangkan Tahun 2017 sebesar Rp(163.653.341.623).

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp645.155.354.334,62 naik sebesar Rp1.675.375.869,16 atau 0,26% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp643.479.978.465,46 dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2018	2017
1. Aset Lancar	171.735.404.076,20	192.815.702.460,80
2. Aset Tetap	472.643.427.462,02	450.193.866.624,66
3. Aset Lainnya	776.522.796,40	470.409.380,00
Jumlah	645.155.354.334,62	643.479.978.465,46

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp171.735.404.076,19 turun sebesar Rp21.080.298.384,61 atau 10,93% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp192.815.702.460,80 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Lancar	2018	2017
1. Kas	95.055.396.012,34	89.831.617.454,83
2. Piutang	49.197.149.610,47	74.358.190.405,82
3. Belanja Dibayar dimuka	378.226.869,87	387.558.833,33
4. Persediaan	27.104.631.583,52	28.238.335.766,82
Jumlah	171.735.404.076,20	192.815.702.460,80

5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp95.095.396.012,34 naiksebesar Rp5.263.778.557,51 atau 5,86% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp89.831.617.454,83 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Kas di Bendahara Penerimaan	-	822.101.933,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	95.055.396.012,34	89.009.515.521,83
Jumlah	95.055.396.012,34	89.831.617.454,83

5.2.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2018.

No	Uraian	2018	2017
1	Rek. 1.003.00163.2 (Bend. Peng. APBD)	-	-
	Jumlah	-	-

5.2.1.1.1.4. Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp98.095.396.012,34 naik sebesar Rp6.085.880.490,51 atau 6,84% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp89.009.515.521,83 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	2017
Kas BLUD	17.536.603.321	12.509.515.521,83
Deposito BLUD	76.500.000.000	76.500.000.000,00
Kas di Bend Penerimaan BLUD-Titipan Pasien (non SiLPA)	1.018.792.691	-
Piutang Retribusi Netto	95.055.396.012,34	89.009.515.521,83

5.2.1.1.1.4.1. Kas BLUD

Kas BLUD adalah saldo kas tunai maupun yang ada di rekening bank yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD. Dan bagian dari SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Rincian Kas BLUD sebagai berikut :

No	Uraian	2018	2017
1	Rek Bank Jateng No: 1.003.00163.2	17.391.623.582,00	12.272.998.419,00
2	Rek Bank Jateng No: 3.003.22300.7	-	-
3	Rek. Bank Jateng No. 2-003-15068-0	40.000.000,00	
4	Rek. Bank Mandiri No: 1390015292281 (EDC)	34.393,34	9.242,83
5	Tunai Di Bendahara Pengeluaran	9.747.186,00	47.575.181,00
6	Tunai Di Bendahara Penerimaan	95.198.160,00	188.932.679,00
	Jumlah	17.536.603.321,34	12.509.515.521,83

Saldo ini merupakan kas BLUD yang berada di bank dan tunai, merupakan bagian dari SiLPA dengan rincian sebagai berikut:

No	EDC	Tunai	Bank	Jumlah
1	34.393,34	9.747.186,00	17.391.623.582,00	
2		95.198.160,00	-	
	34.393,34	104.945.346,00	17.391.623.582,00	17.496.603.321,34

5.2.1.1.4.2. Deposito BLUD

Deposito BLUD merupakan bagian dari SiLPA. Rekening ini penempatan deposito berjangka waktu satu sampai tiga bulan. Deposito BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp76.500.000.000 naik/turun sebesar Rp0 atau 0% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp76.500.000.000.

Rincian Deposito sebagai berikut :

No	Bank	Nomor Bilyet	Tgl. Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
1	Bank Jateng	A135334	25 Oktober 2016	6,25%	15.000.000.000,00
2	Bank Jateng	A251160	06 Agustus 2018	6,25%	20.000.000.000,00
3	Bank Jateng	A251161	06 Agustus 2018	6,25%	20.000.000.000,00
4	Bank BNI	453300666	01 Juli 2016	7,25%	15.000.000.000,00
5	Bank BNI	453297347	01 Juli 2016	7,25%	6.500.000.000,00
	Jumlah				76.500.000.000,00

Rincian Deposito BLUD

No	Uraian	2018	2017
1	Bank Jateng	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
2	Bank BNI	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
	Jumlah	76.500.000.000,00	76.500.000.000,00

5.2.1.1.4.3. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD-Uang Titipan Pasien (non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan BLUD dari uang titipan pasien yang berada di bendahara penerimaan BLUD per 31 Desember 2018.

No	Uraian	2018	2017
1	Rek. Bank Jateng No. 2-003-15068-0 (Bend. Penerimaan Uang Muka)	1.018.792.691,00	
	Jumlah	1.018.792.691,00	-

5.2.1.1.3. Piutang Pendapatan

Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp49.197.149.610,47 turun sebesar Rp25.161.040.795,35 atau 33,84% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp74.358.190.405,82 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	2017
Piutang Retribusi	-	-
Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
Piutang Retribusi Netto	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	54.975.591.640,29	79.260.101.878,33
Penyisihan Piutang Pendapatan	(5.778.442.029,82)	(4.901.911.472,51)
Piutang Lainnya Netto	49.197.149.610,47	74.358.190.405,82

5.2.1.1.3.4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang lain-lain PAD yang sah meliputi piutang pendapatan Pasien umum dan Jaminan/BPJS pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto, piutang bunga deposito dan piutang denda keterlambatan penerimaan atas klaim BPJS. Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp54.975.591.640,29 turun sebesar Rp24.284.510.238,03 atau 30,64% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp79.260.101.878,33 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Piutang Pasien Umum	6.032.023.741,91	5.645.603.411,91
Piutang Askes/Jaminan	48.086.648.834,00	73.399.717.644,50
Piutang jasa Kepelabuhan	-	-
Piutang pemanfaatan GOR Jatidiri	-	-
Piutang Hasil Penjualan Aset	-	-
Piutang TGR	-	-
Piutang Bunga Deposito	303.356.164,38	196.780.821,92
Piutang Lain-Lain pada RSUD/RSJD	553.562.900,00	18.000.000,00
Piutang Lainnya Netto	54.975.591.640,29	79.260.101.878,33

5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan piutang yang dikelola oleh RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan dimungkinkan tidak dapat tertagih per 31 Desember 2018. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.778.442.029,82 naik sebesar Rp876.530.557,31 atau 1,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar 4.901.911.472,51 dengan rincian sebagai berikut:

	2018		2017	
	Piutang	Cadangan	Piutang	Cadangan
- lancar	48.140.340.152,88	240.701.700,76	73.090.266.815,67	365.451.334,08
- menunggak 1-2 tahun	725.474.896,00	72.547.489,60	567.659.932,25	56.765.993,23
- menunggak 2-3 tahun	516.492.666,00	258.246.333,00	418.530.201,91	209.265.100,95
- menunggak 3-5 tahun	772.674.837,91	386.337.418,95	1.826.431.768,50	913.215.884,25
- menunggak lebih dari 5 tahun	4.820.609.087,50	4.820.609.087,50	3.357.213.160,00	3.357.213.160,00
Jumlah	54.975.591.640,29	5.778.442.029,82	79.260.101.878,33	4.901.911.472,51

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk membayar pada Tahun 2019 namun RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto telah melakukan pembayaran pada Tahun 2018 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp378.226.869,86 turun sebesar Rp9.331.963,47 atau 2,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp387.558.833,33 dengan rincian sebagai

	2018	2017
Asuransi BMD	266.233.787,67	266.153.500,00
Asuransi Pegawai	111.993.082,20	121.405.333,33
Sewa	-	-
Jumlah	378.226.869,87	387.558.833,33

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2018, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp27.104.631.583,52 turun sebesar Rp1.133.704.183,30 atau 04,01% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar

	2018	2017
Persediaan Bahan	2.023.906.784,00	-
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.585.299.327,00	6.306.641.663,20
Persediaan Obat-obatan	19.406.795.082,52	21.850.751.252,62
Persediaan untuk Dijual/Dihibahkan	-	-
Persediaan Natura	88.630.390,00	80.942.851,00
Jumlah	27.104.631.583,52	28.238.335.766,82

Catatan Atas Persediaan :

Selama tahun 2018 terdapat persediaan obat dan Alkes yang kadaluwarsa sebesar Rp440.287.126 saldo ini tidak termasuk didalam persediaan obat-obatan. Persediaan yang akan dimusnahkan ini dicatat terpisah dari pencatatan persediaan dalam gudang farmasi. Penempatan persediaan ini pun dilakukan di tempat khusus yang terpisah. Persetujuan pemusnahannya sedang dalam proses dan pencatatan Obat dan Alkes ini dicatat terpisah dari persediaan.

	2018	2017
1. Obat	398.225.108,00	518.762.427,10
2. Alkes	42.062.018,00	17.724.474,00
Jumlah	440.287.126,00	536.486.901,10

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp0, naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp472.643.427.462,02 naik sebesar Rp22.449.560.837,36 atau 4,99% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp450.193.866.624,66 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
1. Tanah	104.730.000.000,00	105.738.750.000,00
2. Peralatan dan Mesin	535.657.994.448,00	532.169.614.460,00
3. Gedung dan Bangunan	238.327.472.800,00	194.575.844.000,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.907.465.684,00	19.539.173.684,00
5. Aset Tetap Lainnya	417.169.106,00	532.793.496,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	592.322.000,00	-
7. Akumulasi Penyusutan	(426.988.996.575,98)	(402.362.309.015,34)
Jumlah	472.643.427.462,02	450.193.866.624,66

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	852.556.175.640
Penambahan	
Belanja Modal	99.538.275.121
Belanja Barang/Jasa	612.322.000
Hibah	66.136.526.300
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	980.400.000
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	490.737.000
Jumlah	1.020.314.436.061
Berkurang	
Ekstrakontable	85.700.000
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	980.400.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	118.498.460.223
Mutasi Keluar	1.117.451.800
Koreksi	-
Jumlah	120.682.012.023
Akumulasi Penyusutan	426.988.996.576
Grand Total	472.643.427.462

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2018.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2018 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.2.1.3.1. Tanah

Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp104.730.000.000 naik sebesar Rp1.008.750.000 atau 0,95% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp105.738.750.000 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Tanah	104.730.000.000,00	-	1.008.750.000,00	105.738.750.000,00
Jumlah	104.730.000.000,00	-	1.008.750.000,00	105.738.750.000,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	105.738.750.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Jumlah	105.738.750.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	1.008.750.000,00
Koreksi	-
Jumlah	1.008.750.000,00
Grand Total	104.730.000.000,00

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp535.657.994.448,00 naik sebesar Rp3.488.379.988,00 atau 0,66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp532.169.614.460,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Alat Besar	23.720.112.704,00	4.737.440.000,00	549.821.429	19.532.494.133,00
Alat Angkutan	6.738.558.313,00	841.381.350,00	2.620.000	5.899.796.963,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.487.624.499,00	8.680.300,00	1.090.762.001	2.569.706.200,00
Alat Pertanian dan Peternakan	26.410.500,00	-	-	26.410.500,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.081.884.756,00	4.924.109.756,00	8.982.132.537	41.139.907.537,00
Alat Studio, Komunikasi dan Peman	892.210.400,00	-	422.979.349	1.315.189.749,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	450.229.065.644,00	107.325.506.262,00	103.481.123.068	446.384.682.450,00
Alat Laboratorium	1.075.671.400,00	894.171.400,00	2.072.808.866	2.254.308.866,00
Alat Persenjataan	-	-	-	-
Komputer	14.406.456.232,00	2.949.843.933,00	1.590.505.763	13.047.118.062,00
Alat Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Pengeboran	-	-	-	-
Alat Produksi, Pengolahan dan Pem	-	-	-	-
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
Alat Peraga	-	-	-	-
Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
Rambu-Rambu	-	-	-	-
Peralatan Olahraga	-	-	-	-
Jumlah	535.657.994.448,00	121.681.133.001,00	118.192.753.013	532.169.614.460,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	532.169.614.460,00
Penambahan	
Belanja Modal	55.917.922.701,00
Belanja Barang/Jasa	20.000.000,00
Hibah	64.762.810.300,00
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	980.400.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-

Koreksi	-
Jumlah	121.681.133.001
Berkurang	
Ekstrakontable	85.700.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	118.107.053.013,00
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	118.192.753.013,00
Grand Total	535.657.994.448,00

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp238.327.472.800,00 naik sebesar Rp43.751.628.800,00 atau 22,49% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp194.575.844.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Bangunan Gedung	237.819.272.800,00	45.099.032.000,00	1.347.403.200,00	194.067.644.000,00
Monumen	-	-	-	-
Bangunan Menara	-	-	-	-
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pastl	508.200.000,00	-	-	508.200.000,00
Jumlah	238.327.472.800,00	45.099.032.000,00	1.347.403.200,00	194.575.844.000,00

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	194.575.844.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	43.234.579.000,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	1.373.716.000,00
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	490.737.000,00
Jumlah	45.099.032.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	980.400.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	258.301.400,00
Mutasi Keluar	108.701.800,00
Koreksi	-
Jumlah	1.347.403.200,00
Grand Total	238.327.472.800,00

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp19.907.465.684 naik sebesar Rp368.292.000,00 atau 1,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.539.173.684,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Bangunan Air/Irigasi	175.000.000,00	-	-	175.000.000,00
Instalasi	15.520.702.735,00	-	-	15.520.702.735,00
Jaringan	4.211.762.949,00	368.292.000,00	-	3.843.470.949,00
Jumlah	19.907.465.684,00	368.292.000,00	-	19.539.173.684,00

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	19.539.173.684,00
Penambahan	
Belanja Modal	368.292.000,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Jumlah	368.292.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	-
Grand Total	19.907.465.684,00

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp417.169.106,00 turun sebesar Rp115.624.390,00 atau 21,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp532.793.496,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	Bertambah	Berkurang	2017
Buku Perpustakaan	175.990.606,00	17.481.420,00	133.105.810,00	291.614.996,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebuday	241.178.500,00	-	-	241.178.500,00
Hewan	-	-	-	-
Blota Perairan	-	-	-	-
Tanaman	-	-	-	-
Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-
Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
Jumlah	417.169.106,00	17.481.420,00	133.105.810,00	532.793.496,00

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	532.793.496,00
Penambahan	
Belanja Modal	17.481.420,00
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	-
Jumlah	17.481.420,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	133.105.810,00
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	133.105.810,00
Grand Total	417.169.106,00

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp592.322.000 naik sebesar Rp592.322.000 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan		2018	Bertambah	Berkurang	2017
Drop Off		200.502.000,00	200.502.000,00		-
Gedung Onkologi		391.820.000,00	391.820.000,00		-
Jumlah		592.322.000,00	592.322.000,00	-	-

No	Pembangunan yang menjadi KDP	No Kontrak	Nilai Kontrak	Masa Pelak.	Realisasi	Fisik (%)
1	Gedung Onkologi	980/DO BLUD NON E/0002/VII/2018	489.775.000	90 HK (2/3/2018 - 30/5/2018)	100	80
2	Drop Off	980/DO BLUD NON E/0001/III/2018	200.502.000	135HK (30/7/18 - 11/12/18)	100	100

Rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan terdiri dari :

Saldo Awal	
Penambahan	
Belanja Modal	-
Belanja Barang/Jasa	592.322.000,00
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	-
Koreksi	
Jumlah	592.322.000,00
Berkurang	
Ekstrakontable	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	-
Mutasi Keluar	-
Koreksi	-
Jumlah	-
Grand Total	592.322.000,00

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp(426.988.996.575,98) naik sebesar Rp24.626.687.560,64 atau 6,12% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp(402.362.309.015,34) dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin	(377.892.349.811,26)	(358.718.937.039,87)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(45.361.472.983,28)	(40.420.918.501,09)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(3.735.173.781,44)	(3.222.453.474,38)
Jumlah	(426.988.996.575,98)	(402.362.309.015,34)

5.2.1.4.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp(377.892.349.811,26) naik sebesar Rp19.173.412.771,39 atau 5,35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp358.718.937.039,87 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Alat Besar	(13.867.568.197,76)	(11.716.028.278,76)
Alat Angkut	(4.076.985.612,00)	(3.453.250.086,76)
Alat Bengkel	(1.276.007.149,10)	(2.268.214.080,20)
Alat Pertanian	(26.410.500,00)	(26.410.500,00)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	(29.676.512.754,40)	(32.254.787.919,80)
Alat Studio dan Komunikasi	(491.605.160,00)	(780.614.269,00)
Alat Kedokteran	(316.946.775.865,00)	(297.015.654.581,60)
Alat Laboratorium	(763.646.425,00)	(2.169.408.866,00)
Alat Persenjataan	-	-
Komputer	(10.766.838.148,00)	(9.034.568.457,75)
Alat Eksplorasi	-	-
Alat Pengeboran	-	-
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-
Alat Bantu Eksplorasi	-	-
Alat Keselamatan Kerja	-	-
Alat Peraga	-	-
Peralatan Proses/Produksi	-	-
Rambu-Rambu	-	-
Peralatan Olahraga	-	-
Jumlah	(377.892.349.811,26)	(358.718.937.039,87)

5.2.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp(45.361.472.983,28) naik sebesar Rp4.940.554.482,19 atau 12,22% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp40.420.918.501,09 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Bangunan Gedung	(45.229.340.983,28)	(40.298.950.501,09)
Monumen	-	-
Bangunan Menara	-	-
Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(132.132.000,00)	(121.968.000,00)
Jumlah	(45.361.472.983,28)	(40.420.918.501,09)

5.2.1.4.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp(3.735.173.781,44) naik sebesar Rp512.720.307,06 atau 15,91% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.222.453.474,38 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Jalan dan Jembatan	-	-
Bangunan Air dan Irigasi	(175.000.000,00)	(175.000.000,00)
Instalasi	(3.191.718.295,81)	(2.803.561.457,25)
Jaringan	(368.455.485,63)	(243.892.017,13)
Jumlah	(3.735.173.781,44)	(3.222.453.474,38)

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp776.522.796,40 naik sebesar Rp306.113.416,40 atau 65,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp470.409.380,00 dengan rincian sebagai

	2018	2017
Aset Dikerjasamakan	-	-
Akumulasi Aset Dikerjasamakan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Dikerjasamakan	-	-
	2018	2017
Aset Tak Berwujud	798.154.233,00	295.750.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(218.780.846,60)	(59.150.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	579.373.386,40	236.600.000,00
	2018	2017
Barang Rusak Berat	113.020.148.018,00	12.732.054.828,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(112.822.998.608,00)	(12.498.245.448,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto	197.149.410,00	233.809.380,00
Jumlah Aset Lainnya	776.522.796,40	470.409.380,00

5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.

5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp798.154.233,00 naik sebesar Rp502.404.233,00 atau 169,88% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp295.750.000 dengan rincian sebagai

	2018	2017
Aset Tak Berwujud		
Software	798.154.233,00	295.750.000,00
Jumlah	798.154.233,00	295.750.000,00

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp(218.780.846,60) naik sebesar Rp159.630.846,60 atau 269,88% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp(59.150.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(218.780.846,60)	(59.150.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	(218.780.846,60)	(59.150.000,00)

5.2.1.5.4. Aset Lain-lain

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp113.020.148.018,00 naik sebesar Rp100.288.093.190 atau 787,68% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.732.054.828,00 merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Tanah Rusak Berat	-	-
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	112.887.042.208,00	12.371.041.428,00
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	-	361.013.400,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	-	-
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	133.105.810,00	-
Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional	-	-
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional	-	-
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional	-	-
Aset Tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional	-	-

	2018	2017
Aset Lain-lain Tanah	-	-
Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin	-	-
Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan	-	-
Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	113.020.148.018,00	12.732.054.828,00

5.2.1.5.5. Penyusutan Aset Lain-lain

Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2018 sebesar Rp(112.822.998.608,00) naik sebesar Rp100.324.753.160,00 atau 802,711% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp12.498.245.448,00) dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(112.822.998.608,00)	(12.498.245.448,00)
Jumlah	(112.822.998.608,00)	(12.498.245.448,00)

5.2.2. KEWAJIBAN

Total Kewajiban per 31 Desember 2018 Rp31.365.284.553,00 naik sebesar Rp102.757.582 atau 0,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp31.262.526.971,00.

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 Rp31.365.284.553,00 naik sebesar Rp102.757.582 atau 0,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp31.262.526.971,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
1. Pendapatan diterima Dimuka	1.162.942.691,00	1.046.251.933,00
2. Utang Belanja	30.202.341.862,00	30.216.275.038,00
3. Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah	31.365.284.553,00	31.262.526.971,00

5.2.2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.162.942.691,00 naik sebesar Rp116.690.758,00 atau 11,15% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.046.251.933,00 merupakan penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo pada periode bersangkutan, tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo pada Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pendapatan Diterima Dimuka	1.162.942.691,00	1.046.251.933,00
Jumlah	1.162.942.691,00	1.046.251.933,00

5.2.2.1.5. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.202.341.862 turun sebesar Rp13.933.176 atau 0,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp30.216.275.038 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Utang Belanja Pegawai	2.398.233.377,00	2.111.848.516,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	27.804.108.485,00	28.104.426.522,00
Jumlah	30.202.341.862,00	30.216.275.038,00

5.2.2.1.5.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.398.233.377,00 naik sebesar Rp286.384.861,00 atau 13,56% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.111.848.516,00, utang belanja ini terdiri dari utang belanja TA. 2018 yang belum dibayarkan seperti utang pegawai BLUD dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Utang Belanja Pegawai	2.398.233.377,00	2.111.848.516,00
Jumlah	2.398.233.377,00	2.111.848.516,00

5.2.2.1.5.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp27.804.108.485 turun sebesar Rp330.318.037 atau 1,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp28.104.426.522,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Utang Jasa Pelayanan	26.491.085.463,00	27.277.157.954,00
Utang Belanja	1.313.023.022,00	827.268.568,00
Jumlah	27.804.108.485,00	28.104.426.522,00

5.2.2.1.5.2.1 Utang Jasa Pelayanan

Utang Jasa Pelayanan per 31 Desember 2018 sebesar Rp26.491.085.463 turun sebesar Rp786.072.491 atau 2,88% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp786.072.491 Utang ini berupa utang Jasa pelayanan Pada RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Utang Jasa Pelayanan	26.491.085.463,00	27.277.157.954,00
Jumlah	26.491.085.463,00	27.277.157.954,00

5.2.2.1.5.2.2 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.313.023.022,00 naik sebesar Rp485.754.454,00 atau 58,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp827.268.568,00, utang belanja ini terdiri dari utang belanja TA. 2018 yang belum dibayarkan seperti utang telepon, listrik, air, internet, dan dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Utang Belanja	1.313.023.022,00	827.268.568,00
Jumlah	1.313.023.022,00	827.268.568,00

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp613.790.069.781,62 turun sebesar Rp1.575.103.144,79 atau 0,26% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp612.217.451.494,46 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
EKUITAS	557.461.694.467,80	612.217.451.494,46
Surplus/Defisit LO	(69.684.946.204,84)	
RK-PPKD KONSOLIDASIAN	126.013.321.518,66	
Jumlah	613.790.069.781,62	612.217.451.494,46

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2018. Pendapatan-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp420.135.983.060,31 naik sebesar Rp47.128.877.919,01 atau 12,63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp373.007.105.141,30 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pendapatan Asli daerah	353.999.456.760	373.007.105.141
Pendapatan Transfer-LO	-	-
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	66.136.526.300,00	-
Jumlah	420.135.983.060,31	373.007.105.141,30

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 naik/turun sebesar Rp0 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0, dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	353.999.456.760	373.007.105.141
Jumlah	353.999.456.760,31	373.007.105.141,30

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp0 naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pajak Kendaraan Bermotor	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-
Pajak Air Permukaan	-	-
Jumlah	-	-

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0, dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Retribusi Jasa Umum	-	-
Retribusi Jasa Usaha	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
Jumlah	-	-

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp353.999.456.760,30 turun sebesar Rp19.007.648.380,99 atau 5,10% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp373.007.105.141,30 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-
Pendapatan Bunga	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-

Penerimaan dari BLUD	353.999.456.760,31	373.007.105.141,30
Penerimaan Lain-Lain		
Jumlah	353.999.456.760,31	373.007.105.141,30

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO per 31 Desember 2018 sebesar Rp66.136.526.300 naik sebesar Rp66.136.526.300,00 atau 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 , dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - LO	65.641.213.800,00	-
- Hibah Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	65.641.213.800,00	-
Pendapatan Lainnya - LO	495.312.500,00	-
- Hibah Dari PT. Krisbow Indonesia	3.362.500,00	-
- Hibah Dari Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto	491.950.000,00	-
Jumlah	66.136.526.300,00	-

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp489.645.284.313,14 naik sebesar Rp18.367.581.765,97 atau 3,90% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp471.277.702.547,18 dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp489.645.284.313,14 naik sebesar Rp18.367.581.765,97 atau 3,90% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp471.277.702.547,18 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Beban Pegawai	123.900.612.934,00	118.177.957.153,00
Beban Persediaan	136.428.848.989,30	128.606.795.798,02
Beban Jasa	122.513.622.871,46	129.301.373.537,13
Beban Pemeliharaan	21.216.999.093,00	18.141.581.139,00
Beban Perjalanan Dinas	1.131.154.024,00	1.335.900.639,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	83.489.622.508,57	74.802.524.189,68
Beban Penyisihan Piutang	878.723.892,81	774.065.091,35
Beban Lainnya	85.700.000,00	137.505.000,00
Jumlah	489.645.284.313,14	471.277.702.547,18

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp123.900.612.934,00 naik sebesar Rp5.722.655.781 atau 4,84% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp118.177.957.153,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Gaji dan Tunjangan	47.637.251.473	47.628.979.345,00
Tambahan Penghasilan PNS	44.807.429.413	42.688.180.334,00
Beban Pegawai BLUD	31.455.932.048	27.860.797.474
Jumlah	123.900.612.934,00	118.177.957.153,00

5.3.2.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp136.428.848.989,30 naik sebesar Rp7.822.053.191,28 atau 6,08% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp128.606.795.798,02 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Beban Habis Pakai	33.365.208.371,20	10.243.431.599,80
Beban Bahan/Material	97.142.891.644,10	111.334.257.604,72
Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya	667.161.858,00	1.546.636.131,00
Beban Pakaian Kerja	191.726.000,00	-
Beban Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	-	-
Beban Makanan Dan Minuman	5.061.861.116,00	5.482.470.462,50
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak K	-	-
Beban Hadiah Barang	-	-
Jumlah	136.428.848.989,30	128.606.795.798,02

5.3.2.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp122.513.622.871,46 turun sebesar Rp6.787.750.665,67 atau 5,25% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp129.301.373.537,13 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Beban Jasa Kantor	116.794.355.321,00	128.251.277.287,13
Beban Premi Asuransi	522.542.963,46	485.859.250,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas	-	-
Beban Sewa Alat Berat	-	-
Beban Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	-	-
Beban Jasa Konsultansi	514.306.120,00	564.237.000,00
Beban Pengadaan Jasa Lainnya	-	-
Beban Cetak Dan Penggandaan	1.278.591.253,00	-
Beban Makanan Dan Minuman	819.863.725,00	-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P	2.583.963.489,00	-
Jumlah	122.513.622.871,46	129.301.373.537,13

5.3.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp21.216.999.093 naik sebesar Rp3.075.417.954 atau 16,95% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp18.141.581.139 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	215.151.951,00	727.934.683,00
Beban Pemeliharaan	21.001.847.142,00	17.413.646.456,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.808.356.405,00	8.668.130.854,00
- Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	7.760.898.000,00	7.482.453.625,00
- Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Dan Jaringan	2.029.897.737,00	977.963.977,00
- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	402.695.000,00	285.098.000,00
Jumlah	21.216.999.093,00	18.141.581.139,00

5.3.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.131.154.024 turun sebesar Rp204.746.615 atau 15,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.335.900.639 dengan rincian sebagai berikut:

	2018	2017
Beban Perjalanan Dinas	1.131.154.024,00	1.335.900.639,00
Jumlah	1.131.154.024,00	1.335.900.639,00

5.3.2.1.10. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp83.489.622.508,57 naik sebesar Rp8.687.098.318,89 atau 11,61% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp74.802.524.189,68 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Beban Penyusutan Aset Tetap	83.263.823.061,97	74.736.153.921,68
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	159.630.846,60	59.150.000,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	66.168.600,00	7.220.268,00
Jumlah	83.489.622.508,57	74.802.524.189,68

5.3.2.1.11. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp878.723.892,81,- naik sebesar Rp 104.658.801,46 atau 13,52% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp774.065.091,35 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Beban Penyisihan Piutang	878.723.892,81	774.065.091,35
Jumlah	878.723.892,81	774.065.091,35

5.3.2.1.12. Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp 85.700.000,00,- naik sebesar Rp 51.805.000 atau 37,67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp137.505.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Beban Lain-Lain	85.700.000,00	137.505.000,00
- Beban Lain-Lain (Ekstrakontable, Penghapusan dan Pelepasan)	85.700.000,00	137.505.000,00
Jumlah	85.700.000,00	137.505.000,00

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

Surplus/defisit Penjualan/Pelepasan Aset tetap Non Lancar digunakan untuk mencatat :

- Ø Apabila barang yang dihapuskan masih terdapat nilai buku (Nilai Perolehan – Akumulasi Penyusutan/amortisasi) maka selisih tersebut dicatat pada akun ini.
- Ø Apabila terjadi penjualan aset tetap maka selisih nilai buku dengan pendapatan yang diterima dari penjualan aset tetap merupakan surplus/defisit penjualan aset non lancar.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp 175.644.952,- naik/turun sebesar Rp 175.644.952 atau % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		
Suplus dari kegiatan Non Operasi lainnya		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	175.644.952,00	
Defisit dari kegiatan Non Operasi lainnya		
Jumlah	(175.644.952,00)	-

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

	2018	2017
1 Ekuitas Awal	612.217.451.494,46	553.290.806.486,15
2 Surplus/Defisit-LO	(69.684.946.204,84)	(98.270.597.405,88)
3 RK-PPKD	126.013.321.518,66	163.653.341.622,68
4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(54.755.757.026,66)	(6.456.099.208,49)
Koreksi/Penyesuaian Kas	5.027.087.799,51	(7.217.421.376,85)
Koreksi/Penyesuaian Piutang	(4.556.455,00)	20.548.112,00
Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	2.193.335,50	(102.740,56)
Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(626.714.800,00)	13.406.079.420,00
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(58.919.957.526,67)	(12.960.952.623,08)
Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	(361.013.400,00)	295.750.000,00
Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	127.204.020,00	-
Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
Ekuitas Akhir	613.790.069.781,62	612.217.451.494,46

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo semula merupakan fusi dari RSU Purwokerto yang berlokasi di Jl. Dr. Angka No.2 Purwokerto. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ini menempati satu paket rumah sakit yang terdiri atas dua lantai yang berlokasi di Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto. Fungsionalisasi lokasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo diresmikan secara keseluruhan pada tanggal 12 November 1995. Dilihat dari aspek geografis lokasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sangat menguntungkan, karena terletak di pusat pengembangan wilayah Jawa Tengah bagian selatan – barat, dan terletak di kota yang terus berkembang menjadi kota besar dan kota perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Dilain pihak kota Purwokerto terletak di pertemuan tiga jalur transportasi menuju pusat rujukan pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, dengan jarak sekitar 200 km dari kota Semarang, Yogyakarta dan Bandung. Kondisi ini sangat strategis bagi pengembangan dan pemasaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai RSUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berpedoman pada Perda No.8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 No.8 seri D No.4, tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah No.94). Dalam Peraturan Daerah (perda) No.8 tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dibidang pelayanan Rumah Sakit yang masing-masing dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menunjang pengelolaan RSUD dapat dibentuk komite-komite, instansi, dan satuan pengawas intern yang pengaturannya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

6.2. VISI, MISI, dan MOTTO RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Visi

“Prima Dalam Pelayanan Sub Spesialistik Dan Pendidikan Profesi”

Misi

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sub Spesialistik.
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kesehatan.

3. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan.
4. Mengembangkan Sarana dan Prasarana yang Unggul, Tepat, dan Aman.
5. Mengembangkan Sistem Manajemen Yang Handal, Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

Penjelasan Visi & Misi

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dalam memberikan pelayanan senantiasa berorientasi pada standar mutu & keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan, baik dalam Pelayanan Sub Spesialistik maupun Profesi yang pengejawantahannya melalui pencapaian misi-misi setiap tahunnya.

MOTTO

“Melayani Dengan Sepenuh Hati”

Penjelasan Motto

Segenap civitas hospitalia RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto memberikan pelayanan prima kepada semua pelanggan dengan dilandasi keikhlasan yang muncul dari hati tanpa membedakan suku, agama, ras & antar golongan serta status sosial, yang tidak hanya berbuah kebaikan tetapi sekaligus bernilai ibadah.

Mengacu pada Misi dan nilai-nilai dalam pencapaian Visi, maka strategi yang dipilih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagai factor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelayanan Unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran;
Pengembangan manajemen mutu Rumah Sakit;
3. Pengembangan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pelayanan dan pendidikan;
4. Pengembangan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
5. Pengembangan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai standar profesi;
6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar Rumah Sakit Klas A;
7. Pengembangan manajemen organisasi meliputi manajemen keuangan dan manajemen perencanaan berbasis SIMRS;
8. Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan sistem remunerasi yang adil dan proporsional

6.3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Perda No.8 Tahun 2008 maka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo mempunyai tugas & fungsi sebagai berikut :

Tugas

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan medis;
- e. Pelayanan penunjang medis non medis;
- f. Pelayanan keperawatan;
- g. Pelayanan rujukan;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan, dan umum.

Struktur Organisasi

Pada tahun 2007 Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman penetapan SOTK Perangkat Daerah dan telah ditetapkan pula Perda No.8 tahun 2008 tentang SOTK RSUD & RSJ Provinsi Jawa Tengah dengan susunan Direktur dibantu oleh tiga Wakil Direktur dan Sembilan Kepala Bagian/Bidang serta 21 Subbagian/Subbidang. Perda tersebut telah dijabarkan pula dalam Pergub nomor 94 tahun 2008 dengan susunan sebagai berikut :

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan & Kerjasama
3. Wakil Direktur Penunjang & Pendidikan
4. Wakil Direktur Umum & Keuangan
5. Kepala Bidang Pelayanan
6. Kepala Bidang Perawatan
7. Kepala Bidang Mutu & Kerjasama
8. Kepala Bidang Penunjang Medis
9. Kepala Bidang Penunjang Sarpras

10. Kepala Bidang Pendidikan & Penelitian
11. Kepala Bagian Umum
12. Kepala Bagian Perencanaan
13. Kepala Bagian Keuangan

Sumber Daya Manusia

Jumlah Karyawan per 01 Nopember 2018 sebanyak 1.712 orang (2017: 1.717 orang), dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2018	2017
1	Tenaga Medis		
	Dokter Spesialis	64	68
	Dokter Umum	22	23
	Dokter Gigi	2	2
	Apoteker	88	27
	Paramedis Non Perawatan	206	206
	Perawat	675	682
	Jumlah Tenaga Medis	1.057	1.008
2	Struktural	33	33
3	Tenaga Non Medis	622	676
4	Total Karyawan	1.712	1.717

6.4. Bidang Usaha dan Kegiatan Utama

Fasilitas Pelayanan

Merujuk pada data pencapaian kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, maka jenis-jenis pelayanan yang ada diantaranya adalah:

1. Pelayanan Rawat Darurat;
2. Pelayanan Rawat Jalan (33 Poliklinik VCT & PTRM);
3. Pelayanan Rawat Inap (25 Ruang perawatan);
4. Pelayanan Rawat Intensif (ICU, ICCU, HCU);
5. Pelayanan Bedah Sentral (16 Kamar Operasi);
6. Pelayanan Maternal Perinatal;
7. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
8. Pelayanan Radiologi (Radiodiagnostik dan Radioterapi);
9. Pelayanan Farmasi;
10. Pelayanan Gizi RS;
11. Pelayanan Radioterapi;
12. Pelayanan Patologi Klinik;
13. Pelayanan Patologi Anatomi;
14. Pelayanan Hemodialisa;
15. Pelayanan Transfusi Darah;
16. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan SDM;

17. Pelayanan Pengolahan Limbah;
18. Pelayanan Forensik dan Pemulasaran Jenazah RS;
19. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
20. Pelayanan Administrasi (Rumah Tangga, Keuangan, Kendaraan Dinas, Keamanan, Manajemen, SIM, Rekam Medis, Pemasaran, Perpustakaan).

Pengembangan Pelayanan Unggulan

Pelayanan unggulan yang ada di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah sebagai berikut:

1. Jantung Terpadu
Keterpaduan pelayanan untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit jantung (Cathlab adalah alat katerisasi jantung).
2. Urologi
Menurunkan angka kesakitan gangguan saluran kencing (ESWL adalah alat pemecah batu ginjal menggunakan teknologi gelombang Elektromagnetik).
3. Onkologi Terpadu
Menurunkan angka kematian akibat keganasan, didukung alat radioterapi (cobalt) dan MRI (pencitraan jaringan tubuh).
4. Maternal Perinatal
Menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan keterpaduan pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif).
5. Private Wings
Pemenuhan pelayanan VIP merupakan bentuk terobosan subsidi silang untuk mendukung pelayanan pasien klas III.

Kapasitas Tempat Tidur

Kapasitas tempat tidur di RSUD Prof. Dr. margono Soekarjo Purwokerto berjumlah 700 Tempat Tidur terdiri dari :

No.	Kelas	Kapasitas
1	VIP B	37
2	VVIP A	65
3	VVIP B	4
4	Klas I	126
5	Klas II	100
6	Klas III	304
8	ICU/HCU/CCU	64
Jumlah Kapasitas		700

Sumber : <http://rsmargono.go.id/pelayanan/rawatinap>

Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit

- Gedung 2 lantai untuk kegiatan pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap
- Gedung 3 lantai untuk kegiatan pelayanan bedah sentral terpadu dengan 16 kamar operasi, ruang ICU dan CSSD (diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah)
- Gedung 2 lantai untuk kegiatan pelayanan penunjang (Radiologi, Radioterapi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Unit Transfusi Darah, Hemodialisa, Endoskopi)
- Gedung pendukung pelayanan (asrama, hostel, dan gedung olah raga).

Pelayanan Rumah Sakit Berbasis SIM Rumah Sakit

- Sistem registrasi didukung sistem antrian online
- Sistem rekam medik elektronik (pelayanan rawat jalan dan rawat inap)
- Sistem billing (akuntabilitas keuangan)
- Sistem lis (laboratory information system)
- Sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning)
- Sistem klaim bpjs berbasis bridging 3 sistem (rs, bpjs, ina-cbg's)
- Sistem penilaian kinerja struktural (360 derajat) dan staf berbasis elektronik

BAB 7

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk Tahun Anggaran 2018. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Jawa Tengah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.